

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, TINGKAT KEMISKINAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2017-2024

Celaudia Imelia Putri¹, Junaidi², Heriberta³

Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi ^{1,2,3}

Email: celaudiaimelia@gmail.com

Keywords

unemployment rate,
income inequality

Abstract

This study aims to: 1) analyze the dynamics of education levels, poverty levels, and unemployment levels in districts/cities in Jambi Province from 2017 to 2024. 2) analyze the effect of education levels, poverty levels, and unemployment levels on income inequality in districts/cities in Jambi Province from 2017 to 2024. The analysis tool used is panel data regression. The results show: 1) income inequality fluctuates between regions, with Jambi City tending to be high (average 0.360) and Bungo relatively low (0.308). The level of education showed an upward trend, with the highest in Jambi City (78.74) and the lowest in East Tanjab (56.44). The highest poverty rate was in East Tanjab (11.34%) and the lowest in Sungai Penuh (2.96%). The highest unemployment rate is in Jambi City (8.03%) and the lowest in East Tanjab (1.73%). 2) Education level, poverty level, and unemployment level simultaneously have a significant effect on income inequality in regencies/cities in Jambi Province in 2017-2024. Partially, the level of education has a positive and significant effect, the poverty rate has a positive and significant effect, and the unemployment rate has a positive and significant effect on income inequality in districts/cities in Jambi Province from 2017 to 2024.

tingkat pengangguran,
ketimpangan
pendapatan

Penelitian ini bertujuan: 1) menganalisis dinamika tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2024. 2) menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2024. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi data panel. Hasil menunjukkan: 1) ketimpangan pendapatan berfluktuasi antar wilayah, dengan Kota Jambi cenderung tinggi (0,360) dan Bungo relatif rendah (0,308). Tingkat pendidikan menunjukkan tren peningkatan, tertinggi di Kota Jambi (78,74) dan terendah di Tanjab Timur (56,44). Tingkat kemiskinan tertinggi di Tanjab Timur (11,34%) dan terendah di Sungai Penuh (2,96%). Tingkat pengangguran tertinggi di Kota Jambi (8,03%) dan terendah di Tanjab Timur (1,73%). 2) tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2024. Secara parsial tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan, tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan, dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh distribusi pendapatan yang merata. Fenomena ketimpangan pendapatan juga terjadi secara global dan menjadi perhatian utama dalam pembangunan internasional. Menurut laporan World Inequality Report 2022, 10% penduduk terkaya dunia menguasai sekitar 52% dari total pendapatan global, sementara 50% penduduk termiskin hanya memperoleh 8% dari pendapatan tersebut (Chancel et al., 2022)

Ketimpangan pendapatan tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang, tetapi juga meningkatkan risiko instabilitas politik, memperlemah kohesi sosial, dan memperburuk kemiskinan multidimensi. Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan telah menjadi agenda prioritas dalam berbagai forum internasional seperti G20 dan United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam tujuan ke-10, yaitu mengurangi kesenjangan di dalam dan antarnegara (Kurnianingsih, 2021). Fenomena global ini memperkuat relevansi kajian ketimpangan pendapatan tidak hanya pada tingkat nasional dan regional, tetapi juga dalam konteks pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan struktural dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang belum terselesaikan secara tuntas (Amali, 2023). Meskipun Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi positif dalam dua dekade terakhir, hasil pembangunan belum didistribusikan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Menurut Todaro dan Smith, ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghambat pembangunan jangka panjang karena menurunkan produktivitas, memperburuk kemiskinan, dan meningkatkan potensi konflik sosial (M. P. Todaro & Smith, 2020).

Tabel 1. Gini ratio menurut provinsi se Sumatera dan Indonesia tahun 2024

Wilayah Provinsi	Gini Ratio
Aceh	0,294
Sumatera Utara	0,306
Sumatera Barat	0,287
Riau	0,306

Kepulauan Riau	0,357
Jambi	0,315
Bengkulu	0,343
Sumatera Selatan	0,331
Kepulauan Bangka Belitung	0,235
Lampung	0,301
Sumatera	0,308
Indonesia	0,381

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data Gini Ratio tahun 2024 pada wilayah Pulau Sumatera dan Indonesia di atas, terlihat bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di sebagian besar provinsi Sumatera berada pada kategori ketimpangan sedang, dengan nilai berkisar antara 0,287 hingga 0,357. Secara keseluruhan, rata-rata gini ratio Pulau Sumatera sebesar 0,308, yang berarti ketimpangan di Sumatera lebih rendah daripada tingkat nasional sebesar 0,381. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia secara umum masih cukup tinggi dibandingkan wilayah Sumatera. Dari keseluruhan provinsi tersebut, Provinsi Jambi memiliki gini ratio sebesar 0,315, berada sedikit di atas rata-rata Sumatera, sehingga menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Jambi masih menjadi isu penting dan perlu mendapatkan perhatian lebih dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Jambi yang stabil belum mampu mengurangi kesenjangan kesejahteraan akibat distribusi pendapatan yang tidak merata, terlihat dari perbedaan kemiskinan, pengangguran, dan kualitas pendidikan antar daerah. Ketimpangan ini dipicu oleh disparitas pendidikan, tingginya pengangguran terbuka, serta konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah tertentu (Siregar & Wahyuni, 2021).

Data gini ratio Provinsi Jambi periode 2019 – 2024 menunjukkan ketimpangan yang fluktuatif antar kabupaten/kota. Kota Jambi memiliki gini ratio tertinggi dan terus meningkat dari 0,339 menjadi 0,395, menandakan meningkatnya ketimpangan pendapatan perkotaan. Untuk Kabupaten Bungo, Merangin, dan Sungai Penuh mengalami penurunan, sementara kabupaten lain menunjukkan tren yang beragam. Rentang pertumbuhan gini ratio antara -0,039 hingga 0,031 mencerminkan perbedaan dinamika sosial ekonomi wilayah. Kondisi ini dipengaruhi karakteristik ekonomi Jambi yang masih didominasi sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan, berbeda dengan provinsi maju yang berbasis industrialisasi dan sektor formal. Berdasarkan penelitian terdahulu, belum terdapat studi yang menggabungkan tingkat pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan dalam satu model untuk konteks Jambi. Ketiga variabel

tersebut relevan karena pendidikan berkaitan dengan jenis pekerjaan pertanian, pengangguran terselubung, serta kemiskinan pedesaan yang dipengaruhi faktor lahan dan harga komoditas.

Lincoln Arsyad (2010) menerangkan bahwa masalah ketimpangan merupakan hal yang sangat kompleks, karena sering kali bersentuhan dengan berbagai nilai sosial pada suatu kelompok masyarakat.

Pendidikan merupakan bagian penting dalam terciptanya kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena dengan adanya pendidikan akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Secara teknis dapat diartikan bahwa pendidikan adalah proses dimana masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi atau lembaga-lembaga lain), dengan sengaja mentransformasikan, warisan budayanya, yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan dari generasi ke generasi (Siswoyo, 2011).

Menurut Aziz et al., (2020), kemiskinan adalah permasalahan yang sukar untuk dipecahkan hampir disetiap wilayah di Indonesia, kemiskinan juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi di Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menimbulkan berbagai problematika sosial.

Menurut BPS (2024), pengangguran terbuka (open unemployment) didasarkan pada konsep seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Menurut Sukirno (2006), pengangguran biasanya dibedakan atas empat jenis yaitu pengangguran friksional, pengangguran siklikal, pengangguran struktural dan pengangguran teknologi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh karena itu, penelitian ini mengkaji pengaruh tingkat pendidikan, kemiskinan, dan pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana dinamika tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran secara parsial pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2024 serta bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2024. Adapun hipotesis yang terdapat pada penelitian ini yaitu diduga tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi

Jambi, diduga tingkat kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, diduga tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, diduga tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka secara simultan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan alat analisis regresi data panel. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif (Yulmardi, 2019). Analisis deskriptif bertujuan untuk menganalisis dinamika tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2024, sedangkan analisis kuantitatif bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2024. Analisis kuantitatif pada penelitian ini menggunakan *software Eviews-12*. Berikut adalah persamaan umum dari regresi data panel dalam penelitian ini.

$$KP_{it} = \beta_0 + \beta_1 TP_{it} + \beta_2 TK_{it} + \beta_3 Tpeng_{it} + eit.....(1)$$

Keterangan:

KP : Ketimpangan Pendapatan ke-i pada waktu ke-t

TP : Tingkat Pendapatan ke-i pada waktu ke-t

TK : Tingkat Kemiskinan ke-i pada waktu ke-t

Tpeng : Tingkat Pengangguran ke-i pada waktu ke-t

β_0 : Konstanta

i : Kabupaten/Kota

t : Waktu

eit : Standar Error

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika ketimpangan pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi pada tahun 2017 – 2024

Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah terdapatnya perbedaan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional diantara masyarakat. Ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah adalah adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Hutabarat, 2015). Ketimpangan pada hakikatnya terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Oleh sebab itu, masing-masing daerah memiliki kemampuan dalam mendorong proses pembangunan yang berbeda-beda (Tarigan, 2004).

Data gini ratio Provinsi Jambi periode 2017 – 2024 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar wilayah masih beragam dan belum konsisten. Beberapa kabupaten seperti Kerinci, Tebo, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat memiliki rata-rata gini ratio relatif rendah, berkisar antara 0,278 – 0,292, yang mencerminkan distribusi pendapatan masyarakat yang cukup merata dan kesenjangan yang tidak terlalu besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapatan antar kelompok masyarakat di wilayah tersebut masih dapat dikategorikan rendah. Sementara itu, kabupaten lain seperti Merangin, Sarolangun, Batang Hari, Muaro Jambi, Bungo, serta Kota Sungai Penuh berada pada kategori ketimpangan sedang dengan rata-rata gini ratio sekitar 0,303 – 0,315. Hal ini menandakan masih adanya perbedaan pendapatan yang cukup nyata antar kelompok masyarakat, meskipun belum mengarah pada ketimpangan yang tinggi. Di sisi lain, Kota Jambi mencatat rata-rata gini ratio tertinggi di Provinsi Jambi sebesar 0,360, yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan sedang hingga mendekati tinggi. Tingginya ketimpangan di Kota Jambi sejalan dengan karakteristik wilayah perkotaan yang memiliki struktur ekonomi lebih kompleks dan variasi pendapatan masyarakat yang lebih besar dibandingkan wilayah kabupaten.

Data pertumbuhan ketimpangan pendapatan (KP) di Provinsi Jambi periode 2018 – 2024 menunjukkan fluktuasi di hampir seluruh kabupaten/kota dengan nilai yang umumnya berada di sekitar nol, sehingga perubahan ketimpangan tergolong tidak tajam. Kerinci, Merangin, Sarolangun, Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat mengalami pergerakan naik turun dengan rata-rata pertumbuhan KP yang relatif kecil, baik positif maupun negatif. Kabupaten Tebo juga menunjukkan fluktuasi ringan dengan rata-rata mendekati nol, sementara Kabupaten Bungo dan Kota Sungai Penuh cenderung mengalami penurunan ketimpangan. Kota Jambi memiliki rata-rata pertumbuhan KP yang hampir stagnan. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan dinamika ketimpangan pendapatan antarwilayah di Provinsi Jambi yang beragam dan belum menunjukkan pola peningkatan atau penurunan yang konsisten selama periode pengamatan.

Tingkat Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia adalah dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia metode terbaru yang dikeluarkan oleh BPS adalah rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Pada proses pembetulan Indeks Pembangunan Manusia, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan yang akan menjadi salah satu komponen pembetulan Indeks Pembangunan Manusia (Kuncoro, 2006). Rata-rata lama sekolah RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal (BPS, 2015). Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Data tingkat pendidikan Provinsi Jambi periode 2017 – 2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat di seluruh kabupaten/kota, meskipun dengan capaian yang berbeda antar wilayah. Kabupaten Kerinci, Batang Hari, Muaro Jambi, Bungo, dan Tanjung Jabung Barat memiliki tingkat pendidikan relatif cukup tinggi dan stabil dengan rata-rata di atas 61. Kabupaten Merangin, Sarolangun, dan Tebo berada pada kategori sedang dengan rata-rata sekitar 59–61, namun menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat rata-rata tingkat pendidikan terendah sebesar 56,44 meskipun mengalami tren peningkatan. Sementara

itu, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh memiliki tingkat pendidikan paling tinggi, masing-masing sebesar 78,74 dan 74,98, mencerminkan kondisi tingkat pendidikan yang jauh lebih baik dan stabil dibandingkan wilayah lainnya.

Data pertumbuhan tingkat pendidikan di Provinsi Jambi periode 2018 – 2024 menunjukkan bahwa hampir seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan setiap tahun dengan besaran yang relatif kecil dan bervariasi. Rata-rata pertumbuhan terendah tercatat di Kabupaten Kerinci sebesar 0,003 persen dan Kabupaten Bungo sebesar 0,004 persen. Kabupaten Batang Hari dan Sungai Penuh masing-masing memiliki rata-rata pertumbuhan sekitar 0,005 – 0,006 persen. Kabupaten Merangin, Muaro Jambi, dan Tebo mencatat rata-rata pertumbuhan sekitar 0,008 persen, sementara Sarolangun sebesar 0,009 persen dan Tanjung Jabung Barat sebesar 0,010 persen. Kota Jambi memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,012 persen, dan pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan rata-rata 0,014 persen. Secara keseluruhan, tingkat pendidikan di seluruh wilayah Provinsi Jambi terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun laju pertumbuhannya relatif rendah dan berbeda antar kabupaten/kota.

Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu penyakit dalam menjadi salah satu penyakit dalam perekonomian suatu negara, terlebih lagi pada negara-negara yang masih berkembang, dimana masalah kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensional (Sjafrizal, 2012). Tingkat kemiskinan adalah ukuran presentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, yaitu ambang batas pendapatan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan), berfungsi sebagai indikator kesejahteraan ekonomi dan efektivitas program sosial, diukur oleh BPS berdasarkan pengeluaran perkapita bulanan, bukan pendapatan (Budiarto, 2024). Kemiskinan maupun jumlah penduduk miskin secara umum terbukti meningkatkan ketimpangan pendapatan dikarenakan semakin banyak penduduk miskin, semakin besar jarak antara kelompok berpendapatan rendah dan tinggi (Farahita, 2025).

Data tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2017 – 2024 menunjukkan perbedaan yang cukup jelas antar wilayah. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 11,34 persen, diikuti Tanjung Jabung Barat 10,42 persen dan Batang Hari 9,72 persen. Kabupaten Merangin, Sarolangun, dan Kota Jambi berada pada tingkat menengah dengan persentase masing-

masing 8,82 persen, 8,59 persen, dan 8,38 persen. Kabupaten Kerinci dan Tebo mencatat tingkat kemiskinan relatif lebih rendah, masing-masing sebesar 7,34 persen dan 6,46 persen, sedangkan Kabupaten Bungo dan Muaro Jambi memiliki persentase lebih rendah lagi, yaitu 5,62 persen dan 4,15 persen. Kota Sungai Penuh mencatat tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Jambi sebesar 2,96 persen. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Provinsi Jambi masih bervariasi dan cenderung lebih tinggi di wilayah kabupaten dibandingkan kota.

Data pertumbuhan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi periode 2018 – 2024 menunjukkan tren penurunan di sebagian besar kabupaten/kota, tercermin dari angka pertumbuhan negatif. Rata-rata pertumbuhan tahunan di Kabupaten Kerinci sebesar -0,009 persen, Merangin -0,015 persen, Sarolangun -0,008 persen, Batang Hari -0,025 persen, Muaro Jambi -0,020 persen, Tanjung Jabung Timur -0,030 persen, Tanjung Jabung Barat -0,024 persen, Tebo -0,014 persen, Bungo -0,018 persen, dan Kota Jambi -0,018 persen. Sementara itu, Kota Sungai Penuh mencatat rata-rata pertumbuhan positif 0,010 persen, menunjukkan peningkatan kemiskinan yang ringan. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa kemiskinan di sebagian besar wilayah Jambi cenderung menurun dari tahun ke tahun, sejalan dengan tren nasional, di mana persentase penduduk miskin Indonesia turun menjadi sekitar 8,47 persen pada Maret 2025 menurut Badan Pusat Statistik.

Tingkat pengangguran

Tingkat pengangguran adalah persentase penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan dibandingkan dengan total angkatan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka digunakan sebagai indikator utama untuk menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja dan kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan terbatasnya kesempatan kerja sehingga berpotensi menurunkan pendapatan rumah tangga, meningkatkan kemiskinan, serta memicu berbagai permasalahan sosial. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang rendah mengindikasikan bahwa perekonomian relatif mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia, meskipun tetap perlu diperhatikan kualitas pekerjaan yang tercipta (Farhan, 2022).

Data tingkat pengangguran Provinsi Jambi periode 2017 – 2024 menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar kabupaten/kota. Kabupaten Kerinci memiliki rata-

rata pengangguran sebesar 2,62 persen, sementara Merangin 4,27 persen dan Sarolangun 4,62 persen, menandakan pengangguran menengah di wilayah tersebut. Batang Hari mencatat 4,07 persen, Muaro Jambi 5,27 persen, dan Bungo 4,87 persen, menunjukkan angka pengangguran yang masih cukup tinggi. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1,73 persen, Tanjung Jabung Barat 2,72 persen, dan Tebo 2,28 persen termasuk wilayah dengan pengangguran rendah. Kota Jambi memiliki tingkat pengangguran tertinggi sebesar 8,03 persen, sedangkan Kota Sungai Penuh berada di angka 4,05 persen. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pengangguran di Provinsi Jambi bervariasi, dengan wilayah perkotaan seperti Kota Jambi menghadapi tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan sebagian besar kabupaten.

Data pertumbuhan tingkat pengangguran di Provinsi Jambi periode 2018 – 2024 menunjukkan dinamika yang bervariasi antar kabupaten/kota, dengan angka pertumbuhan positif dan negatif. Kabupaten Kerinci mencatat rata-rata -0,033 persen, Merangin -0,015 persen, Sarolangun 0,155 persen, Batang Hari 0,040 persen, Muaro Jambi 0,001 persen, Tanjung Jabung Timur -0,002 persen, Tanjung Jabung Barat 0,016 persen, Tebo 0,089 persen, Bungo 0,029 persen, Kota Jambi 0,065 persen, dan Sungai Penuh 0,062 persen. Nilai positif menunjukkan peningkatan pengangguran sementara nilai negatif menandakan penurunan. Kondisi ini mencerminkan perbedaan dinamika pasar kerja lokal di setiap kabupaten/kota, dengan periode penurunan dan peningkatan pengangguran yang tidak seragam. Secara nasional, tren tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia pada 2024 tercatat menurun menjadi sekitar 4,91 persen, menunjukkan perbaikan kondisi pasar kerja secara keseluruhan meskipun tiap wilayah memiliki pola berbeda.

Pengaruh tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi

Analisis regresi data panel adalah metode statistika yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dengan mempertimbangkan variasi antar individu (cross-section) dan variasi waktu (time-series). Dalam melakukan estimasi regresi data panel terlebih dahulu dilakukan pengujian menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman untuk menentukan model terbaik (Gujarati, 2007). Adapun hasil pengujian sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.677018	(11,73)	0.0958
Cross-section Chi-square	19.826601	11	0.0478

Sumber : *Eviews-12*, 2025 (data diolah)

Berdasarkan uji Chow diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai Prob. Chi-Square yakni sebesar $0,0478 < 0,10$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model FEM lebih baik daripada model CEM. Maka model yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.051210	3	0.0045

Sumber : *Eviews-12*, 2025 (data diolah)

Berdasarkan uji hausman tersebut menunjukkan bahwa diperoleh nilai prob section random sebesar $0,0045 < 10$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model FEM lebih baik daripada model REM. Maka model yang dipilih adalah model FEM.

Tabel 4. Hasil Regresi Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.168840	0.042568	3.966404	0.0001
TP?	0.001376	0.000637	2.160809	0.0334
TK?	0.002634	0.001333	1.975629	0.0513
TPeng?	0.007053	0.002034	3.468296	0.0008
Fixed Effects (Cross)				
_BATANGHARI--C	0.004109			
_BATANGHARI--C	0.004109			
_BUNGO--C	0.008453			
_KERINCI--C	-0.018501			
_KOTAJAMBI--C	0.079869			
_MERANGIN--C	-0.000946			
_MUAROJAMBI--C	0.010266			
_SAROLANGUN--C	0.002765			
_SUNGAIPENUH--C	0.029946			
_TANJABBAR--C	-0.030050			
_TANJABTIM--C	-0.053746			
_TEBO--C	-0.034219			
Root MSE	0.027445	R-squared		0.304498
Mean dependent var	0.306370	Adjusted R-squared		0.280787
Schwarz criterion	-4.156670	Log likelihood		200.2504
Hannan-Quinn criter.	-4.222060	F-statistic		12.84241
Durbin-Watson stat	2.050115	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber : *Eviews-12*, 2025 (data diolah)

Berdasarkan model estimasi yang terpilih yaitu FEM, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$KP_{it} = 0,168840 + 0,001376TP_{it} + 0,002634TK_{it} + 0,007053Tpeng_{it} + e_{it}.....(2)$$

Konstanta bernilai 0,168840 artinya apabila variabel tingkat pendidikan, variabel tingkat kemiskinan dan variabel tingkat pengangguran bernilai tetap maka variabel ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017 – 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,168840 satuan. Koefisien variabel tingkat pendidikan bernilai 0,001376. Nilai ini menunjukkan adanya pengaruh positif variabel tingkat pendidikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017 – 2024. Koefisien ini mengartikan bahwa apabila terjadi peningkatan variabel tingkat pendidikan sebesar satu satuan, sementara variabel tingkat kemiskinan variabel tingkat pengangguran bernilai tetap maka variabel ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017 – 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,001376 satuan. Koefisien variabel tingkat kemiskinan bernilai 0,002634. Nilai ini menunjukkan adanya pengaruh positif variabel tingkat kemiskinan terhadap variabel ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017 – 2024. Koefisien ini mengartikan bahwa apabila terjadi peningkatan variabel tingkat kemiskinan sebesar satu persen, sementara variabel tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran bernilai tetap maka variabel ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017 – 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,002634 satuan. Koefisien variabel tingkat pengangguran bernilai 0,007053. Nilai ini menunjukkan adanya pengaruh positif variabel tingkat pengangguran terhadap variabel ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017 – 2024. Koefisien ini mengartikan bahwa apabila terjadi peningkatan variabel tingkat pengangguran sebesar satu persen, sementara variabel tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan bernilai tetap maka variabel ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017 – 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,007053 satuan.

Uji hipotesis

Uji F (uji simultan)

Uji simultan dipilih dalam mengevaluasi apakah variabel-variabel bebas yaitu variabel IPM, variabel tingkat kemiskinan, variabel jumlah penduduk, dan variabel ketimpangan pendapatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu variabel pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil regresi pada tabel 5.11 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai prob F-statistic bernilai 0,000000 yang mana ini menunjukkan bahwa nilai prob f-statistic lebih kecil ($<$) dari taraf signifikansi 0.10 ($0,000000 < 0,10$). Artinya pada variabel tingkat pendidikan (X1), tingkat kemiskinan (X2), dan tingkat pengangguran (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2024.

Uji t (uji parsial)

Uji parsial digunakan untuk melihat adanya pengaruh antar variabel bebas dan variabel terikat secara sendiri – sendiri. Uji t dilihat pada nilai Prob. yang terdapat pada output regresi.

Variabel tingkat pendidikan

Nilai prob. variabel tingkat pendidikan sebesar 0,0334 yang menunjukkan bahwa nilai ini lebih kecil ($<$) dari taraf signifikansi yakni 0,10 ($0,0334 < 0,10$). Artinya variabel tingkat pendidikan (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2024.

Variabel tingkat kemiskinan

Nilai prob. variabel tingkat kemiskinan yakni sebesar 0,0513 yang menunjukkan bahwa nilai ini lebih kecil ($<$) dari taraf signifikansi 0,10 ($0,0513 < 0,10$). Artinya variabel tingkat kemiskinan (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2024.

Variabel tingkat pengangguran

Nilai prob. sebesar 0,0008 yang menunjukkan bahwa nilai ini lebih kecil ($<$) dari taraf signifikansi 0,10 ($0,0008 < 0,10$). Artinya variabel tingkat pengangguran (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2024.

Koefisien determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel tingkat pendidikan, variabel tingkat kemiskinan dan variabel

tingkat pengangguran terhadap variabel terikat yaitu variabel ketimpangan pendapatan. Nilai R-Squared bernilai 0,304498 yang artinya variabel tingkat pendidikan (X1), tingkat kemiskinan (X2), dan tingkat pengangguran (X3) secara simultan memberikan kontribusi sebesar 30% terhadap variabel ketimpangan pendapatan (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2024. Sedangkan 70% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan data 2017–2024 di Provinsi Jambi, ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) berfluktuasi antar wilayah, dengan Kota Jambi cenderung tinggi (rata-rata 0,360) dan Bungo relatif rendah (0,308). Tingkat pendidikan menunjukkan tren peningkatan, tertinggi di Kota Jambi (78,74) dan terendah di Tanjab Timur (56,44). Tingkat kemiskinan menurun di sebagian besar wilayah, tertinggi di Tanjab Timur (11,34%) dan terendah di Sungai Penuh (2,96%). Tingkat pengangguran fluktuatif, tertinggi di Kota Jambi (8,03%) dan terendah di Tanjab Timur (1,73%). Keseluruhan, ketimpangan dipengaruhi oleh perbedaan kualitas pendidikan, tingkat kemiskinan, dan kesempatan kerja, sehingga diperlukan kebijakan pembangunan yang mendorong pemerataan sumber daya dan akses ekonomi antar wilayah.

Berdasarkan hasil regresi data panel dengan menggunakan metode fixed effect model (FEM) dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2024. Adapun semua variabel memberikan kontribusi sebesar 30% terhadap variabel ketimpangan pendapatan. Secara parsial variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan, variabel tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan, dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2024.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amali, F. N., & Syafri. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan 33 Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 815–820.
<https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15424>
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN.

- Aziz, A., Rahman, B., & Sari, C. (2020). Kemiskinan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia.
- BPS. (2015). Profil Sosial Ekonomi Provinsi Jambi. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.
- BPS Provinsi Jambi. (2024). Provinsi Jambi Dalam Angka Tahun 2023. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.
- Budiarto, S. A., Dai, S. I. S., Santoso, I. R., & Mulyati, Y. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(2), 261–268.
<https://doi.org/10.37905/jsep.v2i2.29298>
- Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., & Zucman, G. (2022). World Inequality Report 2022. World Inequality Lab.
- Farahita, C., & Nurhayati, S. F. (2025). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2017-2023. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(1), 1847–1860.
<https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5307>
- Farhan, M., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 243–258.
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.29>
- Gujarati, D. . (2007). Dasar-dasar ekonometrika. Erlangga.
- Hutabarat, D. E. (2015). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesenjangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kurnianingsih, A., Sudati Nur Sarfiah, D., Jalunggono, G., & Ekonomi, F. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Daerah Istimewah Yogyakarta Tahun 2013-2019. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 3(1), 120–136.
- Siregar, H., & Wahyuni, E. (2021). Ketimpangan Pendapatan dan Faktor Penentunya di Provinsi Sumatera.
- Siswoyo, Dwi, dkk. (2011). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Rajawali Pres.
- Sukirno, S. (2006). *Makroekonomi: Pengantar Ekonomi*. PT Raja Grafindo Persada.

- Tarigan, R. (2004). *Ekonomi Regional: Toeri dan Aplikasi*. terjemah Bumi Aksara.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson.
- Yulmardi. (2019). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya* (A. Amir (ed.)).